

Peran Risiko Operasional dalam Memoderasi Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Statement Fraud

Dinesh Basti Farani

Politeknik Negeri Madiun

dnesharma@gmail.com

ABSTRAK

Peran Risiko Operasional dalam Memoderasi Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Statement Fraud* (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI). Peningkatan kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan publik akan meningkatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk investor, auditor, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Aktivitas *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi meningkatkan biaya risiko operasional, yakni berupa denda atau sanksi yang harus ditanggung apabila perusahaan terdeteksi melakukan penipuan (*fraud*). *Corporate governance* merupakan salah satu cara untuk mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak manajemen, khususnya yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan dimoderasi oleh risiko operasional. Pengembangan model penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ulang baik pengaruh langsung antara *corporate governance* terhadap *financial statement fraud*, maupun pengaruh tidak langsungnya melalui peran moderasi risiko operasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di BEI. Berdasarkan kriteria populasi yang ditetapkan, maka diperoleh jumlah populasi sebanyak 25. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, dengan periode pengamatan selama tiga tahun, sehingga total unit data yang diolah adalah sebanyak 75 unit. Analisis data menggunakan model analisis regresi moderasi dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA), yang dilakukan melalui bantuan *software* SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan tindakan *financial statement fraud* yang dilakukan oleh Bank. Sebaliknya interaksi pelaksanaan *corporate governance* dengan risiko operasional dapat menurunkan tindakan *financial statement fraud* yang dilakukan oleh Bank. Temuan penelitian memberikan indikasi bahwa ketika Bank mengkalkulasi besarnya risiko operasional dalam pengelolaan bisnis mereka, maka tindakan kecurangan pada publikasi laporan keuangan akan dikurangi atau diturunkan.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, *Financial Statement Fraud*, Risiko Operasional

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan globalisasi ekonomi, kondisi pasar yang semakin kompetitif, serta perkembangan teknologi informasi, menyebabkan semakin tingginya tingkat kompleksitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Kompleksitas yang dialami perusahaan dapat memicu terjadinya suatu *fraud*. Sebagaimana dinyatakan oleh Indriastuti dan Ifada (2011) bahwa semakin kompleks operasional suatu perusahaan dapat memberikan peluang yang lebih besar pada perusahaan tersebut untuk melakukan *fraud*.

Di sisi lain, *fraud* merupakan salah satu fenomena global yang dianggap sebagai masalah bagi perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor atau wilayah di mana mereka beroperasi (Kurant, 2014). *Fraud* juga dapat menjadi ancaman serius yang mengakibatkan nilai kerugian yang sangat signifikan bagi perusahaan. Kasus-kasus *fraud* yang semakin meningkat telah menjadi perhatian khusus bagi para komunitas bisnis, karena bagaimanapun hal ini dapat memberikan dampak negatif, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hasil kajian *The Economics of Fraud* (2016) mengungkapkan bahwa 59% perusahaan-perusahaan di Asia Pasific menunjukkan indikasi untuk meningkatkan *fraud* dalam lima tahun ke depan, dan sebagian besar justru dilakukan dinegara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat, seperti pasar Indonesia.

Dalam konteks perbankan di Indonesia, perbankan memiliki kedudukan yang strategis, baik sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran maupun penunjang pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, oleh karenanya diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan bertanggung jawab (Bank Indonesia, 2012). *Fraud* itu sendiri dianggap dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi ekonomi (Albrecht, *et al.* 2007),

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan terkait data keuangan atau aktivitas operasional perusahaan. Kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*) diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan salah saji materiil dalam pelaporan keuangan (Generally Accepted Auditing Standard – GAAS, 2006 dalam Suprajadi, 2009). Salah saji tersebut biasanya ditemukan dalam bentuk manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan, dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Secara umum, motif dasar dalam melakukan kecurangan adalah dikarenakan kinerja perusahaan yang buruk sehingga mendorong pihak manajemen untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan (Listyawati, 2016). Kecurangan pada laporan keuangan di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis, ketika mereka dapat melebih-lebihkan hasil usaha (*overstated*) dan kondisi keuangan perusahaan, sehingga penyajian laporan keuangan terlihat baik dalam pandangan publik. Akan tetapi, hal ini juga sangat merugikan publik yang lebih banyak menggantungkan pengambilan keputusan mereka dari laporan keuangan tersebut.

Menurut Yu, *et al.* (2010), penipuan perusahaan (*corporate fraud*) merupakan manifestasi klasik dari masalah keagenan dan tata kelola perusahaan yang lemah. Tindakan *fraud* diindikasikan terjadi akibat adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan (Meutia, 2004). Sementara Dechow dalam Skousen, *et al.* (2009) menyatakan bahwa kecenderungan atas tindakan *fraud* lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dengan latar

belakang yang didominasi oleh pihak dalam (*insider*) dan kemungkinan besar tidak memiliki komite audit.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi permasalahan keagenan antara *prinsipal* dan *agent* adalah melalui tata kelola yang baik (Ritonga, 2014). Selain itu, Badan Pengelola Pasar Modal (BPPM) di beberapa negara juga menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan publik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan dengan baik (Sutoyo dan Aldridge, 2005). Dari sini, dapat dilihat bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* (Chen, *et al.* 2006), karena *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar dapat bertindak yang terbaik untuk kepentingan para investor luar (kreditur atau *shareholder*) (Jackson, *et al.* 2009).

Rezaee dan Kedia (2012) mengungkapkan bahwa permintaan atas *corporate governance*, sebagai upaya mengatasi kecurangan, akan terus meningkat hingga 82 persen di masa mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa *corporate governance* yang baik dapat mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak manajemen, khususnya yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan perusahaan. Aspek-aspek dari *corporate governance* yang efektif juga diprediksikan mampu dalam mengurangi kecurangan, meningkatkan akuntabilitas, keandalan dan kualitas informasi keuangan. Staciokas dan Rupsys (2005) mengidentifikasi unsur-unsur tata kelola perusahaan untuk setidaknya menyertakan komite audit, auditor eksternal, audit internal, dan direksi.

Elemen penting dalam *corporate governance* adalah keterbukaan dan transparansi (Iskander dan Chamlou, 2000). Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer (*agent*), baik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan maupun asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, maka diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi informasi dalam keseluruhan proses operasi perusahaan. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi (*transparency*) tersebut, bank wajib menyampaikan dan mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate governance* (GCG) secara berkala dan berkesinambungan. Sedangkan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif dan terstruktur terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG.

Menurut Komite Basel, praktik tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (*Bank for International Settlement – BIS*, 2010). Hal ini dikarenakan sistem perbankan mempunyai peran yang signifikan dalam perekonomian, sehingga tata kelola perusahaan dan manajemen risiko menjadi sangat penting di lembaga-lembaga keuangan. Pada dasarnya, terdapat keterkaitan erat antara tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan manajemen risiko (*risk management*). Implementasi tata kelola yang efektif akan mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko juga didasarkan pada tata kelola yang efektif, selain bergantung pada efektivitas komunikasi pengendalian internal kepada Dewan.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Arens, *et al.* 2003). Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Pada Lampiran I, Bank Indonesia (2003), dijelaskan bahwa penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan nilai pemegang saham, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Dalam hubungannya dengan aktivitas penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh bank, maka kerangka kerja manajemen risiko yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk memiliki kontrol dalam mencegah terjadinya *fraud*, mendeteksi kemungkinan adanya *fraud* dengan cepat, serta merespons kejadian *fraud* dengan efektif. Sebagaimana ketentuan Bank for International Settlement (BIS) / Komite Basel (2003), bahwa aktivitas *fraud*, baik *internal fraud* maupun *eksternal fraud*, dikelompokkan ke dalam risiko operasional bank.

Secara definitif, risiko operasional bank merupakan risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Pengelolaan risiko operasional pada dasarnya dilakukan dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada sistem dan prosedur, melangsungkan mekanisme yang memungkinkan terdeteksinya potensi terjadinya *internal fraud*, dan menjalankan prosedur untuk mengelola akibat dari risiko operasional tersebut (Siregar, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan *corporate governance* merupakan salah satu upaya dalam mengurangi aktivitas *financial statement fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, peran manajemen risiko sebagai bagian dari implementasi *corporate governance* juga sangat penting dalam melakukan mitigasi atas risiko *financial statement fraud*, sehingga perusahaan akan mengkalkulasi besarnya biaya risiko operasional yang diakibatkan oleh aktivitas *financial statement fraud* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam konteks perbankan, semakin besar tindakan *financial statement fraud* yang dilakukan oleh Bank akan berpotensi meningkatkan biaya operasional Bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, tingkat risiko operasional Bank merupakan salah satu faktor yang harus

dipertimbangkan dalam implementasi *good corporate governance* Bank, sehingga dapat meminimalisasi adanya aktivitas *financial statement fraud* oleh Bank.

Secara empiris, terdapat beberapa penelitian sebelumnya oleh Chen, *et al.* (2006); Gagola (2011); Law (2011); Brody, *et al.* (2012); Ege (2014); Burton, *et al.* (2014); Desai (2015); Gupta dan Gupta (2015); Habib dan Jiang (2015) yang mengungkap keterkaitan antara *corporate governance* dan *fraud*. Dalam penelitiannya, Chen, *et al.* (2006) telah menemukan adanya pengaruh signifikan antara *corporate governance* terhadap *fraud*. Kemudian, Gagola (2011) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Law (2011) telah mengkaji mekanisme *corporate governance* dan menemukan adanya dampak positif pada efektivitas komite audit, efektivitas audit internal, tingkat manajerial, serta pedoman dan kebijakan etika terhadap tindakan penipuan dalam organisasi. Brody, *et al.* (2012); Ege, (2014); Burton, *et al.* (2014) telah menemukan bahwa *corporate governance* yang lemah dapat meningkatkan terjadinya *fraud*. Desai (2015); Gupta dan Gupta (2015); Habib dan Jiang (2015) telah mengungkapkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat melemahkan tiga faktor penipuan (*fraud*) yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi sehingga mengurangi terjadinya *fraud*.

Di sisi lain, keterkaitan antara *corporate governance* dengan risiko bank juga telah dijelaskan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Beasley, 1996; Tsorhe, *et al.* 2011; McNulty, *et al.* 2012; serta Salhi dan Boujelbene, 2012). Beasley (1996) sebelumnya menemukan bukti bahwa komite audit tidak memiliki hubungan dengan penipuan laporan keuangan. Sementara Tsorhe, *et al.* (2011) telah menemukan bahwa proporsi anggota luar mewakili kemandirian dan kekuatan dewan, sehingga kekuatan dewan dan perilaku pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut mempunyai dampak pada manajemen risiko bank, khususnya pada modal, risiko kredit, dan risiko likuiditas. McNulty, *et al.* (2012) dengan mempelajari dampak dari perilaku dewan dan karakteristik direktur pada manajemen risiko keuangan, telah menemukan bahwa proporsi dewan non-eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko keuangan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh langsung antara *corporate governance*, *financial statement fraud*, dan risiko menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan hasil dalam beberapa penelitian tersebut lebih dikarenakan oleh penggunaan model pengukuran yang berbeda pada masing-masing variabel yang sama. Hal ini mengindikasikan *research gap* dalam penelitian, yang menjadi salah satu dasar untuk menguji ulang pola hubungan atau pengaruh langsung antara *corporate governance*, *financial statement fraud*, dan risiko operasional, dengan menggunakan model pengukuran yang relevan dan lebih komprehensif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan model penelitian yang lebih luas, yakni melalui pengembangan model dari penelitian-penelitian sebelumnya terutama yang sudah dilakukan oleh Beasley (1996); Chen, *et al.* (2006); Gagola (2011); Law (2011); Tsorhe, *et al.* (2011); Brody, *et al.* (2012); McNulty, *et al.* (2012); Salhi dan Boujelbene (2012); Burton, *et al.* (2014); Ege (2014); Desai (2015); Gupta dan Gupta (2015); serta Habib dan Jiang (2015), yang telah menguji dampak langsung, baik antara *corporate governance* dan *financial statement fraud* maupun antara *corporate governance* dan risiko. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah

menggunakan peran risiko operasional dalam memoderasi dampak *corporate governance* terhadap *financial statement fraud*, dengan objek penelitian pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji komponen *corporate governance* secara terpisah dan fokus pada aspek-aspek seperti komposisi dan karakteristik dewan, struktur kepemilikan, kualitas internal kontrol, dan eksternal auditor (Ranti, 2011; Bozec dan Bozec, 2012; Rigolini, *et al.* 2012). Namun, hanya sedikit penelitian sebelumnya yang menggunakan parameter pengukuran secara komprehensif dengan mengintegrasikan keseluruhan aspek *corporate governance*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penentuan variabel *corporate governance* pada penelitian ini didasarkan pada nilai peringkat (komposit) pelaksanaan *corporate governance* sebagai hasil dari *self assessment* bank, yang mencakup 11 (sebelas) aspek atau komponen *corporate governance* berdasarkan Surat Edaran BI No.15/15/DPNP/2013.

Pada perbankan di Indonesia, khususnya Bank Umum, perhitungan atas risiko operasional bank masih menggunakan metode *Basic Indicator Approach (BIA)*, yang merupakan metode paling sederhana dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu *standardized approach* dan *advanced measurement approach*. Dengan mempertimbangkan keakuratan hasil penelitian, maka penentuan variabel risiko operasional pada penelitian ini didasarkan pada nilai beban modal risiko operasional sebagai hasil *risk self assessment* bank, yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, *Basel II Accord*, dan ketentuan internal bank.

Pendeteksian terhadap *financial statement fraud* pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *fraud score model*, yakni sebuah pengembangan dari model *fraud triangle* yang mengidentifikasi empat faktor yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization* dan *capability*. Pengukuran dengan *fraud score model (F-score)* dinilai lebih komprehensif dan representatif karena memasukkan semua unsur *accrual quality* dan *financial performance* dari laporan keuangan Bank.

Dari hasil temuan penelitian ini, nantinya dapat dilihat bagaimana pelaksanaan *corporate governance* dalam memberikan dampak, baik secara langsung terhadap *financial statement fraud* maupun secara tidak langsung melalui peran moderasi risiko operasional pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015.

B. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur berisi kajian berbagai teori yang mendasari munculnya penelitian yang berisi berbagai landasan teori dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini didasari oleh teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu hubungan antara atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana pihak *principal* memberikan tugas dan wewenang kepada *agent* untuk melakukan suatu kegiatan atas nama *principal*.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan adanya pemisahan antara

kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan yang dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Masalah keagenan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan.

Penelitian ini juga mengacu pada definitive dari fraud berdasarkan teori yang didasari oleh Association of Certified Fraud Examiners - ACFE (2014). Penipuan perusahaan (*corporate fraud*) merupakan manifestasi klasik dari masalah keagenan dan tata kelola perusahaan yang lemah (Yu, *et al.* 2010). Pendelegasian tugas dari *principal* kepada *agent* membuat *principal* tidak dapat mengawasi kinerja manajer secara menyeluruh, sehingga tercipta suatu kondisi asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi permasalahan keagenan antara *principal* dan *agent* adalah melalui tata kelola yang baik (Ritonga, 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Bank for International Settlement (BIS) / Komite Basel (2003), bahwa aktivitas *fraud*, baik internal *fraud* maupun eksternal *fraud*, dikelompokkan ke dalam risiko operasional bank. Oleh karena itu, aktivitas *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi meningkatkan biaya risiko operasional, yakni berupa denda atau sanksi yang harus ditanggung apabila perusahaan terdeteksi melakukan penipuan (*fraud*).

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsi, mengkonfirmasi, dan membuktikan hipotesis terhadap fenomena yang diamati. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan strategi survei dan eksperimen, melakukan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori dengan uji statistik.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini bersifat *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan dan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Penggunaan Bank Umum sebagai populasi dikarenakan Bank sebagai salah satu industri sektor keuangan di Indonesia telah menjalankan operasinya berdasarkan ketentuan dan monitoring Bank Indonesia (atau OJK) secara langsung, sehingga lebih *rigid* dibandingkan dengan perusahaan pada sektor non keuangan. Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum yang terdaftar di BEI, tidak di *delisting* atau di *relisting* selama periode penelitian.
2. Bank Umum yang mempublikasikan laporan *corporate governance* dan telah melakukan *self assessment* pelaksanaan GCG selama periode penelitian.
3. Bank Umum yang mempublikasikan laporan manajemen risiko dan telah melakukan *risk self assessment* atas perhitungan risiko operasional selama periode penelitian.
4. Bank Umum yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan menyediakan data yang dibutuhkan selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria populasi di atas, jumlah Bank Umum yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 Bank, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 25. Dari keseluruhan populasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau sensus. Berdasarkan periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian, maka unit data yang diolah adalah sebanyak 75 unit, yang berasal dari 25 sampel penelitian dikalikan 3 tahun.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentatif, yakni berupa laporan *corporate governance*, laporan manajemen risiko, dan laporan keuangan Bank Umum yang dipublikasikan selama periode penelitian.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang akan digunakan antara lain:

1. Data peringkat pelaksanaan GCG, yang diambil dari laporan *corporate governance* yang dipublikasikan Bank pada periode tahun 2013 – 2015.
2. Data perhitungan kuantitatif risiko operasional, yang diambil dari laporan manajemen risiko yang dipublikasikan Bank pada periode tahun 2013 – 2015.
3. Data *financial statement fraud*, yang diambil dari laporan keuangan yang diterbitkan per 31 Desember dan dipublikasikan melalui website perusahaan atau website BEI (www.idx.co.id) pada periode 2013 – 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku atau arsip yang ada di perusahaan yang telah dipublikasikan dan dikaitkan dengan penelitian (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan cara meng-copy atau men-download data-data yang diperlukan, baik yang berasal dari website perusahaan, publikasi BEI (www.idx.co.id) maupun publikasi saham ok (www.sahamok.com).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4.1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Statement Fraud*

Pelaksanaan *corporate governance* terbukti memberikan pengaruh penting terhadap *financial statement fraud* di dalam obyek penelitian Bank Umum di Indonesia. Arah pengaruh tersebut ditemukan positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin membaik pelaksanaan *corporate governance* maka secara langsung dapat mendorong terjadinya tindakan *financial statement fraud* pada Bank yang bersangkutan.

Secara rata-rata hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* pada Bank Umum sudah baik, dengan skor peringkat 4,05 dari skala 5. Disisi lain, persentase tindakan *financial statement fraud* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 67,49%, yang artinya tingkat kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh sebagian besar Bank Umum masih cukup tinggi, dengan persentase di atas 50% dari keseluruhan data laporan keuangan yang disajikan atau dipublikasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata Bank telah dikelola dengan baik, namun tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank masih cukup tinggi.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian oleh Chen, *et al.* (2006) yang menemukan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*; Law (2011) yang menemukan bahwa efektivitas komite audit, efektivitas audit internal, tingkat manajerial, serta pedoman dan kebijakan etika berhubungan positif dengan adanya penipuan dalam organisasi; dan Gagola (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya temuan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nuryaman, *et al.* (2010) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *fraud*; Wicaksono (2015) yang menemukan bahwa komite audit dan efektivitas audit internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan; serta Wicaksono (2015) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Dalam konteks perusahaan, dimana terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi (*agency problem*) karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya masing-masing. Tindakan *fraud* dikaitkan dengan masalah keagenan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kondisi ini biasanya terjadi pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk menentukan metode maupun estimasi yang dapat digunakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diskresi sehingga dapat mengarahkan perilaku manajemen menjadi oportunistik. Diskresi tersebut umumnya digunakan manajemen untuk kepentingan yang menguntungkannya secara pribadi tetapi merugikan perusahaan dan pemegang saham secara umum.

Secara lebih jauh, perilaku manajemen yang bersifat oportunistik ini dapat mendorong kemungkinan dilakukannya kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola

(*corporate governance framework*). Perusahaan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama terkait dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, GCG juga berkaitan dengan upaya meyakinkan investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan dan bahkan menginvestasikan dana investor ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan, serta bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry, 2012). Mekanisme GCG tersebut memberikan efek monitoring terhadap pelaksanaan operasional perbankan sehingga membantu manajemen dalam menghasilkan keputusan yang baik yang dapat berdampak pada kinerja bank.

Di sisi lain, aktivitas *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan masih akan dapat terjadi meskipun manajemen telah menetapkan kebijakan yang tepat, melatih staf yang mereka miliki, mengeksekusi penilaian risiko *fraud* yang tinggi, serta membentuk pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* (Torpey & Sherrod, 2011). Dalam hal ini, dibutuhkan strategi *respon fraud* sebagai sarana formal dalam menangani deteksi kasus *fraud* (*Chartered Global Management Accountant – CGMA*, 2012). Berdasarkan laporan CGMA (2012) dijelaskan bahwa strategi *respon fraud* perlu untuk dilakukan dengan setidaknya mencakup prosedur untuk mengumpulkan bukti dan pemeriksaan dengan cara menginformasikan pengambilan keputusan yang efektif sambil memastikan bukti yang dikumpulkan dalam hal tindakan hukum. Lebih lanjut, CGMA (2012) juga menganjurkan adanya komposisi tim *respon fraud* setidaknya terdiri atas tim internal dan eksternal serta harus dipimpin oleh manajer puncak yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa kecurangan laporan keuangan telah dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Dechow *dalam* Skousen, *et al.* 2009, insiden kecurangan tertinggi biasanya terjadi pada perusahaan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Kecenderungan melakukan tindakan *fraud* lebih besar terjadi pada perusahaan dengan latar belakang yang didominasi oleh pihak dalam (*insider*) dan berkemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow, *et al. dalam* Skousen, *et al.* 2009). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dimana meskipun hasil peringkat pelaksanaan *corporate governance* Bank sebagian besar menunjukkan predikat baik, namun tingkat *fraud* laporan keuangan yang dilakukan bank tersebut juga masih cukup tinggi, khususnya dalam tiga tahun terakhir.

Temuan penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi *corporate governance* berpengaruh penting terhadap *financial statement fraud*, dimana dampak pelaksanaan *corporate governance* pada Bank justru meningkatkan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi GCG yang baik pada bank tidak selalu menjamin dapat menurunkan tindakan *fraud*. Hal ini sejalan dengan pendapat Saleh, Iskandar dan Rahmat (2005) yang berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan saat ini tidak cukup efektif dalam memberikan kontrol yang memadai dalam mengurangi insentif manajemen untuk terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan. Selain itu, Salami, *et al.* 2014 juga menyebutkan bahwa meskipun pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan telah diterapkan, namun beberapa perusahaan masih melakukan *fraud*. Bahkan, perusahaan yang

ditemukan melakukan *fraud* diketahui memiliki kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi kegagalan dalam implementasi *corporate governance* tersebut terutama terjadi ketika mereka menyimpang dari kode dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Mardjono, 2005).

Apabila Bank fokus pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi, dalam artian Bank berusaha meningkatkan kinerja mereka untuk dapat menciptakan persepsi positif dari pasar, maka potensi tindakan *fraud* akan semakin tinggi. Hal ini memungkinkan terjadi, karena untuk dapat memberikan sinyal positif ke pasar, bank akan berusaha menampilkan kinerja yang baik pada laporan keuangan yang mereka publikasikan, sehingga menimbulkan celah untuk sengaja memodifikasi hasil laporan keuangan mereka. Dalam teori segitiga kejahatan dinyatakan bahwa *fraud* dipicu oleh tiga faktor yaitu kesempatan, tekanan/motif, dan justifikasi/pembenaran. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Crawford dan Weirich (2011) yang mengatakan bahwa perusahaan melakukan penipuan laporan keuangan untuk: (1) meningkatkan kinerja keuangan dan menghindari laporan kerugian sebelum pajak, dan (2) meningkatkan nilai harga saham untuk menarik investor perusahaan. Apabila kinerja keuangan Bank menunjukkan hasil yang baik, maka pasar akan merespon positif. Respon positif dari pasar akan meningkatkan harga saham Bank yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dari Bank tersebut.

Selain itu, pemisahan kepengurusan juga sangat berperan penting dalam mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kecilnya proporsi jumlah dewan independen akan berdampak pada kurangnya independensi dewan dalam melakukan monitoring secara optimal. Pengawasan internal yang lemah membuka peluang sangat besar bagi pelaku kejahatan perbankan merealisasikan tindakannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahnamay dan Nabavi (2010) bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan manajemen, sehingga adanya proporsi yang tidak seimbang antara kepengurusan pihak dalam (*insider*) dan pihak luar (*outsider*) akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan tata kelola yang dijalankan oleh Bank.

4.4.2. Peran Moderasi Risiko Operasional pada Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Statement Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko operasional memberikan peran moderasi pada pengaruh *corporate governance* terhadap *financial statement fraud*. Arah pengaruh tersebut ditemukan negatif, sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan risiko operasional dapat secara langsung menurunkan tindakan *financial statement fraud* pada bank yang bersangkutan.

Secara rata-rata, besarnya beban risiko operasional pada Bank Umum di Indonesia adalah sebesar 1.193.647, yang artinya rata-rata Bank mengkalkulasi besarnya risiko operasional atas bisnis mereka sebesar Rp. 1.193.647. Di sisi lain, Rata-rata *corporate governance* Bank sebesar 4,05 dan rata-rata *financial statement fraud* Bank sebesar 67,49%. Kondisi ini menyiratkan bahwa biaya risiko operasional yang tinggi dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*, meskipun hal ini masih menunjukkan tingkat kecurangan yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Bank.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian oleh Salhi dan Boujelbene (2012) yang menemukan bahwa ukuran dewan yang lebih kecil membantu mengurangi kegiatan *risk taking*. Kemudian Tsorhe, *et al.* (2011) menyatakan bahwa proporsi anggota luar mewakili

kemandirian dan kekuatan dewan. Sebaliknya, temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh McNulty, *et al.* (2012) yang menemukan bahwa proporsi dewan non-eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko keuangan. Beasley (1996) menemukan bukti bahwa komite audit tidak memiliki hubungan dengan penipuan laporan keuangan.

Effendi (2009) menjelaskan bahwa *good corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sementara risiko operasional melibatkan gangguan dalam pengendalian internal, personil dan tata kelola perusahaan yang mengarah ke kesalahan, penipuan, kegagalan kinerja, sehingga berdampak pada kerugian keuangan (Arora dan Agarwal, 2009).

Lewis (2004) menjelaskan bahwa risiko operasional dapat mengurangi nilai perusahaan secara dramatis dan bahkan tiba-tiba, sehingga dampak dari risiko operasional ini tidak hanya menimbulkan kerugian internal saja, namun juga kerugian eksternal perusahaan (Cruz, 2003). Risiko operasional juga dikaitkan dengan aktivitas bisnis perusahaan dengan hasil usaha yang dicapai perusahaan (King, 2001), sehingga untuk dapat meningkatkan nilai perusahaannya Bank harus dapat menurunkan risiko-risiko yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan.

Hanggraeni (2010) menyatakan bahwa risiko bersifat dinamis dan memiliki interdependensi satu sama lain. Dalam hal ini, dinamisme sifat risiko tersebut harus dapat diantisipasi sejak awal. Pengelolaan risiko operasional pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sesuatu yang salah pada sistem dan prosedur, melangsungkan mekanisme yang memungkinkan terdeteksinya potensi terjadinya internal fraud, dan menjalankan prosedur untuk mengelola akibat dari risiko operasional tersebut.

Risiko operasional dapat terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi, maka bank wajib menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut dapat dideteksi, dikendalikan, dan diatasi kemunculannya. Risiko operasional kalau tidak ditangani secara serius dapat berdampak buruk terhadap nama baik bank bersangkutan, yang pada gilirannya akan memengaruhi penghimpunan dana nasabah dan keuntungan bank. Penerapan *Corporate governance* idealnya ditujukan untuk mengurangi segala tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Bank, karena di satu sisi Bank menerapkan praktik *good corporate governance* untuk memaksimalkan nilai perusahaan, namun di sisi lain untuk menghindari atau mencegah adanya tindakan *fraud* atau KKN.

Temuan penelitian ini sangat menarik, karena pada hasil temuan pertama mengungkapkan bahwa implementasi *corporate governance* justru akan meningkatkan tindakan *fraud* laporan keuangan. Namun hasil yang kedua ini mengungkapkan bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan risiko keuangan akan menurunkan tindakan *fraud* laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank. Sebagaimana diketahui bahwa *corporate governance* merupakan salah satu mekanisme yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol perusahaan dalam upaya mengantisipasi dampak terjadinya risiko bisnis, khususnya risiko operasional. Dalam penerapan *good corporate governance*, Bank secara umum mengimplementasikan manajemen risiko yakni dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko, sehingga dari

keseluruhan profil risiko tersebut Bank dapat melakukan upaya mitigasi atas segala bentuk potensi risiko yang dapat muncul.

Ketika Bank mengkalkulasi atau mempertimbangkan besarnya biaya atas risiko operasional yang dapat terjadi dari hasil kebijakan strategis mereka, maka hal ini akan mencegah Bank untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan atau penyimpangan. Dengan kata lain, apabila bank melakukan tindakan *fraud* pada laporan keuangan mereka, yang terutama dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka dampak dari tindakan tersebut nantinya justru akan menambah posting biaya yang lebih besar. Dalam hal ini, dampak terjadinya tindakan kecurangan tersebut akan menimbulkan biaya denda yang sangat besar, sehingga akan mempengaruhi aktivitas operasional bank yang diakibatkan oleh terganggunya likuiditas pada bank tersebut.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang dipublikasikan oleh Bank Umum yang terdaftar di BEI. Berdasarkan desain maupun metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengukuran *corporate governance* dan risiko operasional dalam penelitian ini hanya didasarkan pada hasil *self assessment* bank yang dipublikasikan pada laporan tahunan masing-masing Bank Umum yang bersangkutan. Komponen penilaian yang digunakan terutama mengacu pada ketentuan BI atau OJK, sehingga model pengukuran lain yang mungkin menggunakan komponen yang berbeda tidak dapat digunakan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan kondisi riil bank. Selain itu, generalisasi hasil penelitian ini juga tidak dapat digunakan untuk penelitian pada perusahaan sektor lain (khususnya non keuangan) yang umumnya tidak *rigid* terhadap peraturan BI atau OJK.
2. Pengukuran *financial statement fraud* dalam penelitian ini hanya didasarkan pada *Dechow model (F-score)*, sehingga hasil penelitian mungkin akan berbeda apabila pengukuran *financial statement fraud* dilakukan dengan menggunakan proxy lain, seperti *Beneish model (M-Score)* dan *modified Jones model*.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan fenomena perusahaan perbankan di Indonesia, kesenjangan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan pada *financial statement fraud*. Adanya implementasi *corporate governance* dapat secara langsung meningkatkan terjadinya tindakan *financial statement fraud*. Secara rata-rata, tingkat implementasi *corporate governance* pada Bank Umum yang terdaftar di BEI menunjukkan peringkat yang baik, namun tingkat *financial statement fraud* yang dilakukan oleh Bank-Bank tersebut masih cukup tinggi dengan persentase di atas 50 persen.

2. Risiko operasional dapat memberikan peran moderasi pada pengaruh *corporate governance* terhadap *financial statement fraud*. Dalam hal ini, peran moderasi risiko operasional dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap *financial statement fraud*, sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan risiko operasional dapat secara langsung menurunkan terjadinya *financial statement fraud* pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Secara rata-rata, tingkat beban modal risiko operasional Bank secara rata-rata juga menunjukkan nilai yang cukup tinggi.

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M. dan Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M selaku Dosen Pembimbing dalam Penelitian ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Sugiyati Wulandari dan Bapak Mochamad Basori Bastia yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan untuk penulis. Dan Pihak lainnya yang berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya teman-teman Magister Manajemen Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Malang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht C., Albrecht C.C., Dolan S. (2007). *Financial Fraud: The How and The Why*. *EBF*, Vol. 29.
- Annisya, Mafiana, Lindrianasari, dan Yuztitya Asmaranti. (2016). Pendeteksian Kecurang Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 23, No. 1, pp. 72 – 89.
- Ansar, Muhammad. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arora, D., dan Agarwal, R. (2009). *Banking Risk Management in India and RBI Supervision*. Di akses tanggal 27 Februari 2017 dari <http://ssm.com/abstract=1446264>.
- Bank Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2012. *Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan*. Diakses tanggal 20 Februari 2017 dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>.
- Bank for International Settlement (BIS). (2003). *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*. Basel Committee on Banking Supervision.
- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, Vol. 71, No. 4, pp. 443-465
- Beasley M.S., Carcello J.V., Hermanson D.R., Lapidés P.D. (2000). Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons*, Vol. 14, No. 4, pp. 441-454.

- Beneish, Messod D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. *Financial Analysts Journal*, Vol. 55, pp. 24–36.
- Brennan, Niamh M. dan McGrath, Mary. (2007). Financial Statement Fraud: Incidents, Methods and Motives. *Australian Accounting Review*, Vol. 17, No. 2, pp. 49-61.
- Bunget, O. (2009). *The Role of Financial Auditor in Detecting and Reporting Fraud and Error*. MPRA Paper No. 12888. Diakses tanggal 27 Februari 2017 dari <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12888/>.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Daniel N. Gao, dan Oliver M. Rui. (2006). Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 12, pp. 424– 448.
- Crawford, L.R. dan T.R. Weirich. (2011). Fraud Guidance for Corporate Counsel Reviewing Financial. *Journal of Financial Crime*, Vol. 18, No. 4, pp. 347-360.
- Desai, Naman. (2015). *The Effects of Fraud Risk Factors and Client Characteristics on Audit Procedures*. Indian Institute of Management.
- Dorminey, J.W., Fleming, A.S., Kranacher, M.J., dan Riley, R.J. (2010). *The Evolution of Theories that Attempt to Explain Why People Commit Fraud and the Anti-Fraud Profession's Response*. Working paper, West Virginia University.
- Effendi, A. Muh. (2009). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1. Pp. 57-74.
- El-Gammal, W. dan Showeiry, M. (2012). Corporate Governance and Quality of Accounting Information: Case of lebanon. *The Business Review Cambridge*, Vol. 19, No. 2, pp. 310-315.
- Ernst and Young. (2009). *Detecting Financial Statement Fraud: What Every Manager Needs to Know*. E & Y LLP, London.
- Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI). (2004). *Corporate Governance Self Assessment Checklist - Penilaian Mandiri (Self Assessment) Praktik Corporate Governance Perusahaan*. Diakses tanggal 20 Februari 2017 dari <http://www.wordpress.com>.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM – SPSS 23*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Habib, A., dan Jiang, H. (2015). Corporate Governance and Financial Reporting Quality in China: A Survey of Recent Evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 24. pp 29-45.

- Indriastuti, Maya dan Luluk M. Ifada. (2011). Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud (Studi Kasus Pada Bank Umum Tahun 2010). *EKOBIS*, Vol. 12, No. 2, pp. 168-176.
- Iminza, N.W., Gikiri W.I., dan Kiragu D.N. (2015a). Bank Size and Occupational Fraud Risk: Empirical Evidence from Commercial Banks in Kenya. *European Journal of Business Management*, Vol. 2, No. 1, pp. 189-404.
- Iminza, N.W., Gikiri W.I., dan Kiragu D.N. (2015b). Operational Governance and Occupational Fraud Risk in Commercial Banks in Kenya. *European Journal of Business Management*, Vol. 2, No. 1, pp. 401-423.
- Jackson, L.A. Owens, Robinson D. dan Shelton S.W. (2009). The Association between Audit Committee Characteristics, the Contracting Process and Fraudulent Financial Reporting. *American Journal of Business*, Vol. 24, No. 1, pp. 57-65.
- Jaffar, Nahariah. (2009). Fraud Detection: The Moderating Role of Fraud Risk Level. *Journal of Business and Public Affair*, Vol. 2. No. 1, pp. 1-15.
- Kohli, S. S. (2003). Corporate Governance in Banks: Towards Best Practices. *IBA Bulletin*, 25, 29-31.
- Kurant, Paulina. (2014). *Corporate Fraud and its Consequences: An Empirical Study*. Dissertation unpublished, Economia E Gestao, U Porto.
- Law, P. (2011). Corporate Governance and no Fraud Occurrence in Organizations Hong Kong Evidence. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26, No. 6, pp. 501-518.
- Lev B. (2003). Corporate Earnings: Facts and Fiction. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 17, No. 2, pp. 27-50.
- Listyawati, Ika. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U Ke-2*, Semarang.
- Lou, Y. dan Wang, M. (2009). Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business & Economics Research*, Vol. 7, No. 2, pp. 61-78.
- Magnanelli, Barbara Sveva. (2010). *The Role of Corporate Governance in Financial Statement Frauds*. Thesis Unpublished, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli.
- Mardjono, A. (2005). A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20, No. 3, pp. 272-283.
- McMullen, D. (1996). Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, pp. 87-103.

- Masdupi, Erni. (2005). Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik Keagenan. *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 20, No. 1, pp. 57 – 69.
- Meutia, Intan. (2004). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.7, No. 3.
- Mohd-Sanusi, Z., Omar, N., Rameli, M.N.F., & Ozawa, N. (2015). Governance Mechanism in Malaysian Banking Sector. *Asian Criminology*, Vol. 10, pp. 231-249.
- Mursalim. (2005). *Income Smoothing dan Motivasi Investor: Studi Empiris pada Investor Di BEJ I*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
- Nuryaman, Rusmin, dan Joy Nanta Ginting. (2010). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIV, No. 2, pp. 152-164.
- Pangeran, Perminas dan Deresti Salaunaung. (2016). Praktek Tata Kelola Dan Kepemilikan Institusional: Bukti Empiris Dari Sektor Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XX, No. 02, pp. 216-237.
- Permatasari, Ika dan Retno Novitasary. (2014). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 7, No. 1.
- Priambodo, R. E. A dan E. Suprayitno. (2007). *Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Landasan Kinerja Perbankan Nasional*. Usahawan, No. 05, Th. XXXVI.
- Rahnamay, Roodposhti, F. dan Chashmi, S. A. Nabavi. (2011). The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management. *African Journal of Business Management*, Vol. 5, No. 11, pp. 4143-4151.
- Reinstein, A. dan Calderon T.G. (2006). Examining Accounting Departments Ranking of the Quality of Accounting Jounals. *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 17, pp. 457-455.
- Rezaee, Z. dan B. L. Kedia. (2012). Role of Corporate Governance Participants in Preventing and Detecting Financial Statement Fraud. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 4, No. 2, pp. 176-205.
- Richardson, Jeff, Neil Atherton Day, Stuart Peacock, dan Angelo Iezzi. (2004). Measurement of the Quality of Life for Economic Evaluation and the Assessment of Quality of Life (AQoL) Mark 2 Instrument. *The Australian Economic Review*, Vol. 37, No. 1, pp. 62-88.
- Salami, O.L., Johl, S.K., dan Ibrahim, M.Y. (2014). Holistic Approach to Corporate Governance: A Conceptual Framework. *Global Business and Management Resaerch: An International Journal*, Vol. 6, No. 3, pp. 251-255.

- Salhi, B. dan Boujelbene, Y. (2012). Effect of the Internal Banking Mechanisms of Governance on the Risk-taking by the Tunisian Banks. *International Journal of Economics, Finance and Management*, Vol. 1, No. 1, pp. 8-19.
- Santosa, Purbaya B. dan Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft dan SPSS. Edisi I*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sanusi, Zuraidah M., Norhayati M., Normah O., and Mohd-Daniel M.N. (2015). Effects of Internal Controls, Fraud Motives and Experience in Assessing Likelihood of Fraud Risk. *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 2, pp. 194-200.
- Siregar, Hermanto. (2012). Pentingnya Mitigasi Risiko Operasional Perbankan. Diakses tanggal 28 Februari 2017 dari <http://koran.bisnis.com/read/20120420/251/73450/pentingnya-mitigasi-risiko-operasional-perbankan>.
- Soltani, B. (2014). The Anatomy of Corporate Fraud: A Comparative Analysis of High Profile American and European Corporate Scandals. *Journal of Business Ethics*, Vol. 120, pp. 251-274.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suprajadi, Lusy. (2009). Teori Kecurangan, Fraad Awareness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol. 13, No. 2.
- Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP. (2013). *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Diakses tanggal 10 Februari 2017, dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/f8688e071dd1448c9206ed470f2af533SEGCGFinal1.pdf>.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavananda. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uzun, H., Szewczyk, S.H., dan Varma, R. (2004). Board Composition and Corporate Fraud. *Financial Analysts Journal*, Vol. 60, pp. 33-43.
- Widjaja, Amin. (2011a). *Accounting Fraud*. Jakarta: Harvarindo.
- Zam, Z.M., Pok, W.C., dan Ahmed, A.D. (2014). Factors of Fraud Occurrence and Corporate Structures: Evidence from Emerging Market Malaysia. *Corporate Ownership and Control*, Vol. 11, No. 3, pp. 133-153.